



Stagnansi Kinerja Penegakan Hukum

Di tengah melejitnya kepuasan terhadap kinerja pemerintah, apresiasi pada penegakan hukum masih stagnan. Kasus-kasus hukum yang belum tuntas menjadi faktor pendorong stagnansi apresiasi publik.

Masih landainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum terekam dalam survei periodik *Kompas*, Juni 2024. Berdasarkan survei tatap muka ini, tingkat kepuasan pada bidang penegakan hukum ada di angka 57,4 persen atau sedikit menurun dibandingkan dengan capaian pada survei Desember 2023 (58,3 persen).

Dibandingkan dengan bidang kerja lain, kepuasan pada bidang penegakan hukum ini relatif lebih rendah. Kepuasan pada bidang ekonomi yang acap kali menempati posisi terburuk kini justru berjarak cukup lebar dengan penegakan hukum. Di bidang ekonomi, tingkat kepuasan publik berada di angka 65,1 persen. Adapun tingkat kepuasan pada bidang kerja lain, seperti politik dan keamanan serta kesejahteraan sosial, jauh lebih tinggi, di atas 80 persen.

Dibaca dalam rentang waktu yang panjang, capaian kinerja bidang penegakan hukum kali ini melanjutkan tren stagnansi yang telah terjadi selama lima tahun terakhir. Bisa dibilang, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah soal penegakan hukum ini kembali ke titik awal periode kedua pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

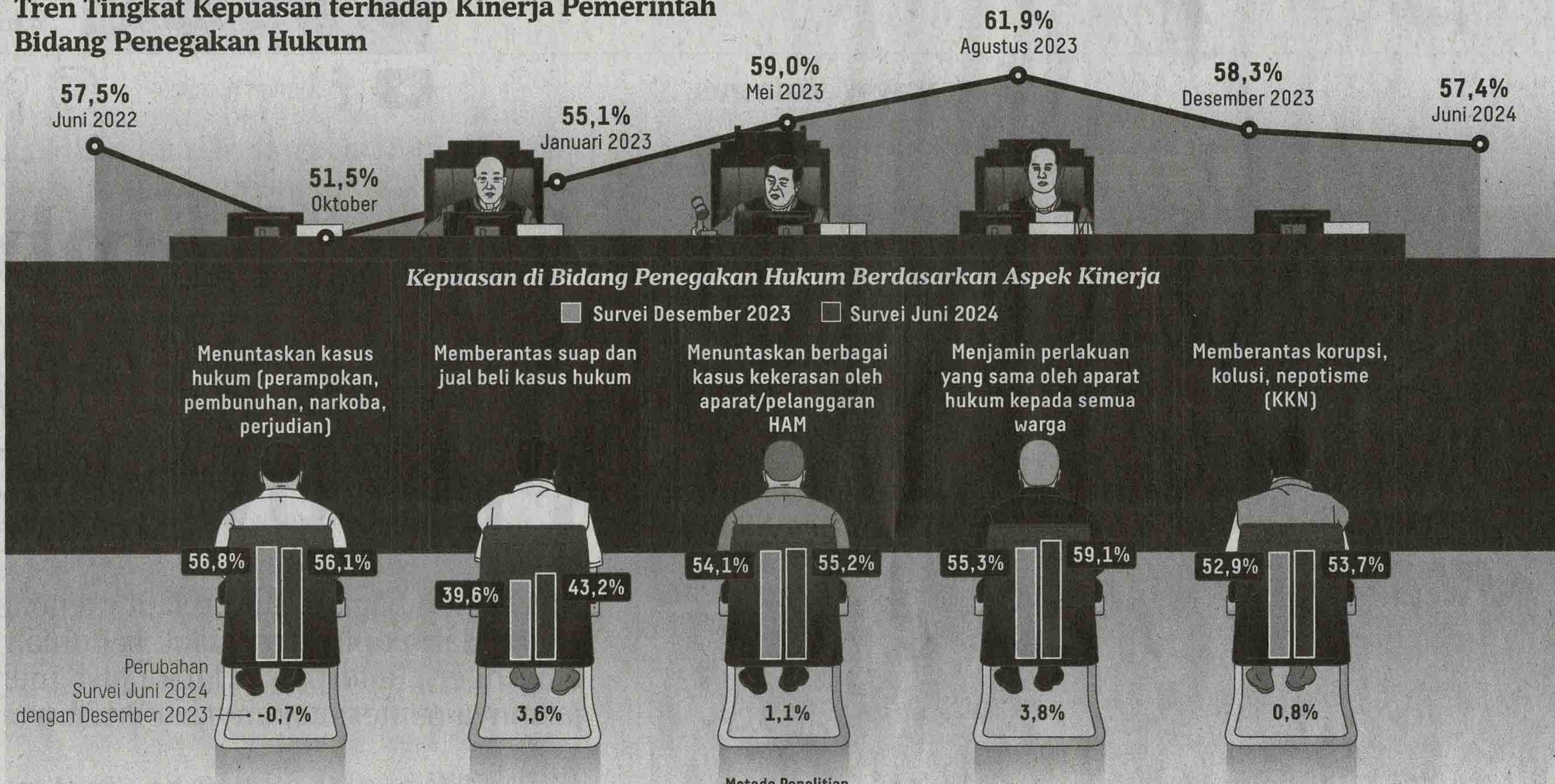
Saat itu, berdasarkan hasil survei *Kompas* pada Oktober 2019, tingkat kepuasan bidang penegakan hukum berada di angka 55,2 persen. Penilaian ini menunjukkan, publik melihat belum ada perkembangan luar biasa dalam upaya pemerintah untuk memperbaiki kinerja di bidang penegakan hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa aspek penegakan hukum ini menjadi sektor kinerja yang sangat sulit untuk diperbaiki oleh pemerintahan sekarang. Lebih lanjut, paling minimnya tingkat kepuasan ini juga menjadi penanda bahwa selain peningkatan kesejahteraan dan perbaikan ekonomi, kepastian hukum dan keadilan juga mendapat perhatian di benak publik.

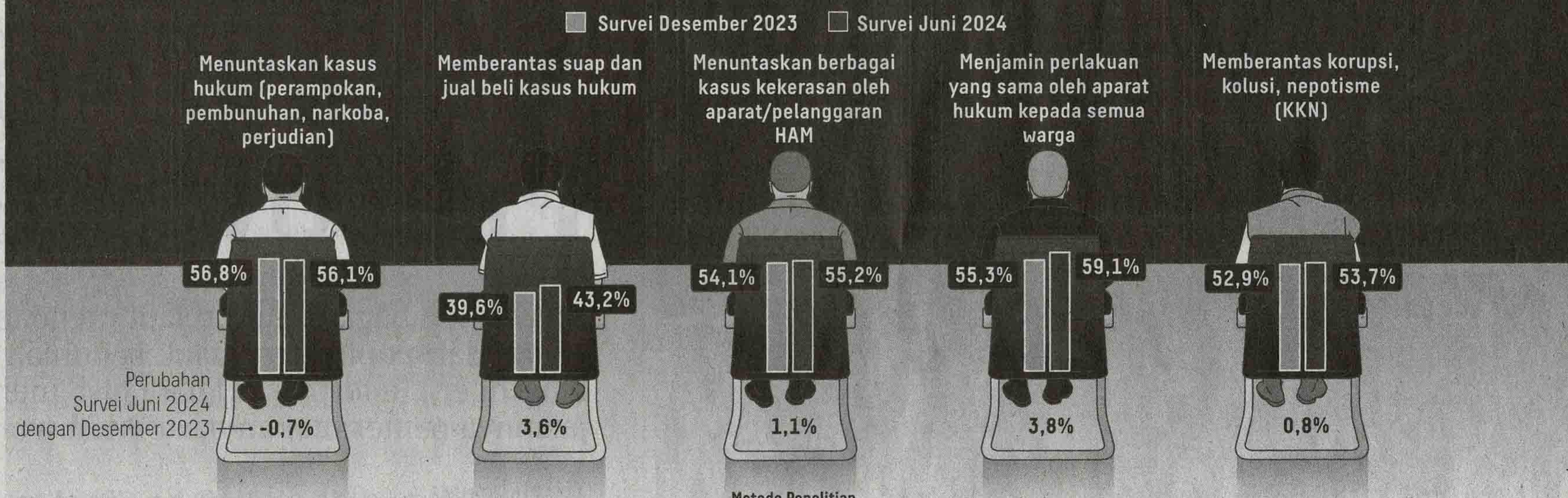
Citra penegak hukum

Selain melihat tingkat kepuasan secara umum, survei oleh

Tren Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Pemerintah Bidang Penegakan Hukum



Kepuasan di Bidang Penegakan Hukum Berdasarkan Aspek Kinerja



Metode Penelitian

Survei periodik melalui wawancara tatap muka diselenggarakan Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibayai sepenuhnya oleh harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

Sumber: Litbang Kompas/RFC/RGA

INFOGRAFIK: LUHUR

Litbang *Kompas* juga melihat aspek-aspek dalam kerja-kerja di bidang penegakan hukum. Temuan survei kali ini menunjukkan bahwa jaminan perlakuan yang sama di mata hukum jadi penopang tingkat kepuasan publik.

Dalam aspek ini, tidak kurang dari 59,1 persen masyarakat menyatakan puas. Dibandingkan dengan survei sebelumnya, penilaian publik terhadap kerja pemerintah dalam hal menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum pada semua warga pun meningkat sekitar 4 persen. Peningkatan ini bisa jadi pertanda baik bahwa kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum masih bisa terjaga.

Hal tersebut juga terkonfirmasi dengan hasil survei kali ini. Beberapa citra lembaga hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),

Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilihat lebih positif dibandingkan dengan survei sebelumnya. Citra positif MA naik 7,1 persen dan citra KPK naik 8,6 persen. Begitu pula dengan citra Polri yang naik 1,6 persen.

Terwujudnya rasa kesetaraan di mata hukum ini tidak lepas dari pengungkapan kasus hukum yang melibatkan pejabat tinggi negara. Penegakan hukum bagi bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, misalnya, menunjukkan bahwa pejabat tinggi pun tidak kebal hukum di republik ini.

Selaras, penuntasan kasus-kasus kekerasan oleh aparat atau pelanggaran hak asasi manusia (HAM) juga mendapat apresiasi lebih dari masyarakat. Dalam survei kali ini, 55,2 persen responden puas dengan kerja pemerintah dalam aspek

ini. Capaian ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan survei Desember 2023 (54,1 persen).

Hal ini bisa jadi tidak terlepas dari upaya pemerintah yang sejak tahun lalu berupaya menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Saat itu, diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM yang Berat.

Kemudian, pada 2023-2024, pemerintah telah memberikan hak-hak korban untuk tahap pertama. Secara personal, korban, di antaranya, dibangunkan rumah serta diberikan jaminan sosial dan kesehatan, bantuan hewan ternak dan alat pertanian, dan pelatihan keterampilan kerja. Mereka yang telah menerima hak seperti korban pelanggaran HAM berat di

Aceh, yakni pada kasus Rumoh Geudong, Jambu Keupok, dan Simpang KKA (*Kompas*, 16/5/2024).

Korupsi jadi catatan

Di luar kesetaraan hukum dan penyelesaian kasus kekerasan aparat, kepuasan publik di kinerja aspek lain masih tampak stagnan. Salah satunya adalah aspek pemberantasan korupsi yang relatif tidak berubah dari survei sebelumnya.

Di satu sisi, sebagian besar responden (53,7 persen) masih memberi respons positif terhadap kinerja pemerintah terkait pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, dengan 40,9 persen warga menyatakan ketidakpuasannya, ruang untuk perbaikan masih terbuka sangat luas.

Tidak mengherankan, aspek pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum juga masih

mendapat sorotan negatif. Di satu sisi, dibandingkan dengan pengukuran sebelumnya, kepuasan pada aspek ini meningkat 3,6 persen. Namun, aspek ini masih dinilai sebagai yang paling buruk. Hal ini tecermin dari hampir 46,8 persen dari masyarakat yang menyatakan ketidakpuasannya.

Selain soal korupsi, masyarakat juga memberikan catatan terkait dengan aspek penuntasan kasus hukum. Secara umum, kepuasan pada aspek ini memang bukan yang terburuk. Buktinya 56,1 persen responden survei mengaku puas pada kerja-kerja penuntasan kasus kriminal, seperti perampokan, pembunuhan, perjudian, dan narkoba. Meskipun begitu, tingkat kepuasan pada aspek ini relatif menurun tipis.

Tertahannya kepuasan publik di bidang ini bisa jadi didorong oleh mencuatnya ka-

sus-kasus kriminal yang menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Sebut saja kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat; pembunuhan pemilik rental mobil di Pati, Jawa Tengah; hingga kasus judi daring.

Terkait judi daring perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini mengingat temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) pada 2022 hingga 2023 yang menyebutkan tidak kurang dari 3 juta warga Indonesia bermain judi daring. Dalam rentang tersebut, para penjudi telah melakukan transaksi sekitar Rp 34,5 triliun dalam bentuk deposit. Dari jumlah ini, baru sekitar Rp 138 miliar yang transaksinya mampu diintervensi oleh PPATK.

Tak ayal, upaya serius dalam mengenyahkan perjudian daring menjadi kunci untuk memperbaiki kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum. Dalam perspektif yang lebih luas, kesuksesan pemerintah mengatasi persoalan ini juga berkaitan dengan kinerja bidang lain, seperti ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Apabila bocornya dana hingga puluhan triliun rupiah ini tak bisa ditangani, daya konsumsi masyarakat akan semakin terkikis dan roda perekonomian pun melambat. Ketika hal ini terjadi, permasalahan sosial, seperti kemiskinan dan bahkan hingga kasus-kasus kriminalitas, pun pasti akan merebak.

(RANGGA EKA SAKTI/
Litbang Kompas)